

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

TANTANGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG PARTISIPASI DESA PADA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 2025

Mustafa, Dwi Sutri Astuti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: mustafa@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyoroti tantangan komunikasi yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi desa dan kelurahan pada Lomba Desa tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil studi menunjukkan Lomba Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki tujuan positif sebagai instrumen evaluasi dan motivasi percepatan pembangunan desa–kelurahan. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan masih muncul, terutama terkait kompleksitas instrumen penilaian, beban administrasi yang tinggi, serta minimnya dukungan pendampingan teknis bagi desa yang memiliki kapasitas rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan kesiapan sumber daya antara desa maju dan desa tertinggal yang memengaruhi partisipasi dalam lomba. Hal ini tampak dari alasan beberapa desa yang enggan ikut lomba karena tingginya biaya persiapan dibanding potensi hadiah yang diterima. Di sisi lain, aspek seremonial dalam menyambut tim penilai masih menjadi fokus di tingkat daerah, sehingga sering menimbulkan duplikasi beban pembiayaan dan mengaburkan orientasi utama lomba sebagai evaluasi pembangunan substantif.

Kata kunci: Komunikasi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Lomba Desa

Abstract

This study highlights the communication challenges faced by the Riau Provincial Government in increasing village and sub-district participation in the 2025 Village Competition. The study used a qualitative approach with interview and observation techniques. The results show that the Village and Sub-district Competition in Riau Province essentially has a positive objective as an evaluation instrument and motivation to accelerate village development. However, in practice, various obstacles still arise, particularly related to the complexity of the assessment instruments, high administrative burdens, and minimal technical assistance support for villages with low capacity. Furthermore, there is a mismatch in resources between developed and underdeveloped villages that affects participation in the competition. This is evident in the reasons why some villages are reluctant to participate in the competition due to the high preparation costs compared to the potential prizes received. On the other hand, the ceremonial aspect of welcoming the assessment team remains a focus at the regional level, often resulting in duplication of financial burdens and the activation of the competition's primary orientation as a substantive development evaluation.

Keywords: Government Communication, Community Participation, Village Competition

Pendahuluan

Lomba Desa dan Kelurahan merupakan mekanisme evaluatif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menilai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, kapasitas kewilayahan, serta dinamika kemasyarakatan pada desa/kelurahan berstatus berkembang maupun cepat berkembang. Lomba ini dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi capaian dan status perkembangan desa/kelurahan sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal (Rahmawati & Rasyid, 2022). Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 diarahkan untuk mengidentifikasi, mengapresiasi, dan mendiseminasikan terobosan serta inovasi tata kelola di tingkat desa/kelurahan; tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik, melainkan juga pada penguatan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi–sosial dalam menghadapi dinamika dan tantangan kontemporer maupun prospektif, sekaligus mengakselerasi dukungan desa/kelurahan terhadap program-program prioritas pemerintah (Bolombo, 2025).

Pada level pelaksanaan, Kemendagri menyelenggarakan seleksi berjenjang yakni administrasi, klarifikasi lapangan, pleno, dan paparan/penetapan juara dengan keterlibatan provinsi sebagai pembina dan penghubung antara pusat–kabupaten/kota (*Kemendagri Gelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional 2024* / *tempo.co*, 2024; Zulkarnain, 2024). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat pada 8 April 2025 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan 2025, meminta pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan dan memfasilitasi kegiatan ini, serta memastikan partisipasi desa/kelurahan yang memenuhi kriteria (*Surat Mendagri Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2025* / PDF, t.t.). Secara konseptual, lomba desa berfungsi sebagai pemicu perbaikan kinerja dan penegasan standar pelayanan dan tata kelola tingkat lokal, namun bukti empiris menunjukkan pembinaan pasca-juara belum selalu terstruktur di banyak daerah (Rahmawati & Rasyid, 2022). Penelitian lain juga menemukan bahwa proses lomba dapat berjalan baik, tetapi dampaknya terhadap pemberdayaan warga kerap terbatas bila tidak diiringi komunikasi dan penguatan kapasitas yang memadai ((Haris et al., 2023) Yusuf, 2013).

Dalam konteks tersebut, komunikasi publik pemerintah menjadi penentu partisipasi: model Government Public Relations menekankan pengambilan keputusan komunikasi yang selaras dengan kepentingan publik dan politik kebijakan (Liu & Horsley, 2007). Literatur komunikasi sektor publik menyoroti kebutuhan menutup “kesenjangan” antara organisasi

pemerintah dan warga melalui strategi komunikasi yang sistematis dan berbasis kepercayaan (Canel & Luoma-aho, 2019). Pemanfaatan media daring juga terkait dengan transparansi dan efektivitas penyediaan informasi, yang berdampak pada keterlibatan warga dalam program pemerintah (Hong, 2013). Transformasi digital memperluas kanal sosialisasi lomba desa, tetapi disparitas akses internet antarwilayah menimbulkan risiko eksklusi informasi bagi desa yang konektivitasnya rendah (Haryanto, 2024) Data BPS menunjukkan perbedaan akses internet rumah tangga antara wilayah kota dan desa masih nyata, yang berimplikasi pada jangkauan komunikasi kebijakan dan kompetisi di tingkat akar rumput. Gambaran makro terbaru juga memperlihatkan peningkatan akses nasional, namun kesenjangan desa–kota tetap perlu diperhitungkan dalam strategi diseminasi informasi program (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Pada sisi permintaan, partisipasi masyarakat desa dipengaruhi pengetahuan, pendidikan, dan literasi kebijakan, sehingga integrasi edukasi publik menjadi prasyarat komunikasi lomba yang efektif (Maros, 2021). Penelitian-penelitian partisipasi desa mengindikasikan pentingnya pendekatan yang menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek seremonial ((Haris et al., 2024) Rahma & Niswah, 2020). Faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kapasitas, minimnya pendekatan pemerintah, dan hambatan sosial-ekonomi dapat menurunkan kemauan berpartisipasi pada agenda kolektif (Yunita & Idrus, 2023).

Kesenjangan penelitian tampak pada fokus studi yang lebih banyak menilai output lomba di tingkat mikro seperti kepemimpinan kepala desa, kesiapan tim lomba, atau praktik satu desa/kelurahan—ketimbang mengkaji komunikasi pemerintah provinsi untuk mendorong partisipasi lintas daerah (Yova & Mashur, 2025; Yusuf, 2013). Sebagian kajian menyoroti dinamika internal desa berprestasi, tetapi belum secara sistematis koordinasi komunikasi provinsi sebagai simpul antara kebijakan pusat dan motivasi desa mengikuti.

Di sisi lain, riset mengenai evaluasi desa dan kelurahan (Evdeskel) banyak membahas aspek sistem/aplikasi dan pengukuran (misalnya Prodeskel/EPDeskel) ketimbang dimensi engagement dan desain pesan lintas kanal pada level provinsi (Al-Aslam, 2022; Alfarizhi & Nuryanto, 2024). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memindahkan lensa analisis dari “tools and scoring” menuju “governance communication” yang menggerakkan motivasi, kesiapan dokumen, dan koordinasi multi-aktor agar desa mau dan mampu ikut lomba (Canel & Luoma-aho, 2019; Liu & Horsley, 2007).

Studi Pospech tentang kompetisi desa di Republik Ceko menemukan fakta bahwa kontes desa nasional lebih mengutamakan representasi dan citra 'desa yang baik' yang berpusat pada kehidupan sehari-hari dan aktivitas sosial penduduknya, sehingga menghasilkan jenis pedesaan yang spesifik ((Mas'od et al., 2023) Pavel dkk., 2015). Sebuah studi dari Finlandia meninjau kriteria kompetisi desa nasional yang di dalamnya memuat perencanaan strategis, proyek pembangunan, tanggung jawab pribadi terhadap kesejahteraan lokal, dan fokus pada warisan budaya serta semangat komunitas merupakan elemen inti yang sejalan dengan pendekatan neoliberal. Kumpulainen menemukan bahwa faktor internal komunitas telah menjadi kunci keberhasilan atau penyebab kemunduran dan menyimpulkan dengan mengatakan bahwa 'kompetisi dapat dianggap sebagai teknik pemerintahan yang membangun norma dan cita-cita bagi komunitas pedesaan. Kumpulainen lebih lanjut menekankan bahwa belum ada yang menyelidiki bagaimana kompetisi dialami oleh penduduk desa (Kumpulainen, 2016). Pengetahuan tentang apakah kompetisi semacam itu menjadi dasar peningkatan ketimpangan jika "pemenang mengambil semuanya" atau apakah kompetisi merupakan peluang bagi penduduk desa, merupakan perspektif penting yang terabaikan di saat suara penduduk pedesaan di belahan bumi utara umumnya digambarkan sebagai protes karena merasa "tertinggal" (Winther & Svendsen, 2012)

Berangkat dari hal tersebut artikel ini ingin membahas tantangan komunikasi Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong partisipasi desa untuk mengikuti lomba desa tahun 2025.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin menggali makna, persepsi, dan dinamika kebijakan lomba desa secara mendalam pada level pelaksana dan pemangku kepentingan lokal (Creswell & Poth, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala desa non-peserta lomba untuk menggali tantangan yang mereka hadapi, serta pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena metode wawancara dinilai efektif untuk mengungkap pengalaman kebijakan secara langsung dari aktor di lapangan (Kvale & Brinkmann, 2015). Selain itu, dokumentasi berupa pedoman teknis lomba, dan surat-menyurat instansi pemerintah digunakan sebagai data pendukung untuk memvalidasi informasi hasil wawancara (Bowen, 2009) Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan kompetensi informan terhadap isu penelitian (Palinkas dkk., 2015). Seluruh data dianalisis dengan teknik analisis tematik melalui proses reduksi

data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara iteratif, sesuai prosedur analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian (Denzin, 2012)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau, tercatat hanya lima peserta yang mengikuti lomba tahun ini, terdiri atas empat desa dan satu kelurahan. Jumlah ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan total 1.933 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Provinsi Riau (BPS, 2024). Artinya, tingkat partisipasi hanya mencapai 0,26 persen. Angka yang sangat rendah ini memperlihatkan bahwa terdapat persoalan serius, baik dalam aspek komunikasi, mekanisme pelaksanaan, maupun faktor internal desa itu sendiri.

Untuk menggali lebih jauh alasan di balik minimnya partisipasi sekaligus tantangan komunikasi pemerintah Provinsi Riau, penelitian ini melakukan wawancara dengan sejumlah kepala desa dan lurah, serta menelaah dokumen dan laporan terkait. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa terdapat beragam alasan mengapa mayoritas desa memilih tidak berpartisipasi. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Beban Pembiayaan sebagai Tantangan Utama

Ketiga kepala desa di Kabupaten Kampar memberikan pandangan yang relatif homogen mengenai persoalan biaya. Kepala Desa Kubang Jaya, Kualu, dan Tarai Bangun, misalnya, mengemukakan bahwa kendala utama terletak pada faktor biaya. Menurut mereka, mengikuti lomba desa membutuhkan persiapan besar yang mencakup perbaikan administrasi, penataan lingkungan, hingga penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang dinilai tim juri. Semua kegiatan itu tentu memerlukan anggaran tidak sedikit, sementara alokasi dana desa lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Lebih jauh lagi, hadiah yang diperoleh pemenang lomba dianggap tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga banyak desa menilai partisipasi dalam lomba bukanlah pilihan yang rasional.

Kepala Desa Kubang Jaya Tarmizi menyebutkan:

“Kalau ikut lomba itu biayanya besar. Kita harus siapkan acara, dokumentasi, persiapan ini-itu. Sementara hadiah yang didapat itu ya kadang tidak sebanding.”
(Wawancara, Kepala Desa Kubang Jaya)

Hal serupa diungkapkan Kepala Desa Kualu Darmawan:

“Dana desa terbatas dan harus untuk kebutuhan prioritas. Kalau ikut lomba, pasti keluar biaya tambahan. Tidak wajib juga, jadi kita pilih yang lebih penting dulu.”
(Wawancara, Kepala Desa Kualu)

Demikian pula Kepala Desa Tarai Bangun Andra Maistar:

“Lomba bagus untuk motivasi, tapi pengeluaran besar duluan. Belum tentu hasilnya memuaskan.”
(Wawancara, Kepala Desa Tarai Bangun)

2. Kompleksitas Instrumen Penilaian

Selain persoalan biaya, kompleksitas instrumen penilaian juga menjadi keluhan. Salah Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak mengungkapkan bahwa jumlah indikator yang dinilai sangat banyak dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemerintahan, kewilayahan, partisipasi masyarakat, inovasi, hingga kelembagaan desa. Durasi penilaian pun relatif lama, kadang memakan waktu berhari-hari. Kondisi ini membuat desa merasa terbebani, karena mereka harus menyiapkan segala sesuatu secara detail dalam waktu yang terbatas. Tidak semua desa memiliki kapasitas administrasi yang memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga wajar bila banyak yang memilih untuk tidak ikut serta.

Instrumen penilaiannya banyak. Dokumen administrasi harus lengkap. Penilaian lapangan juga lama. Itu yang berat bagi kami.”(Wawancara, Kepala Desa Minas Barat)

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau adalah kompleksitas instrumen penilaian yang diterapkan pada seluruh tahapan lomba, mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Instrumen yang digunakan mencakup berbagai komponen penilaian administratif dan kinerja pembangunan desa yang sangat detail. Namun dalam praktiknya, kondisi ini justru memunculkan sejumlah persoalan di tingkat pelaksana desa.

Pertama, desa dibebani dengan persyaratan administrasi yang sangat banyak, seperti kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes), dokumen pengelolaan keuangan (APBDes), regulasi lokal berupa Peraturan Desa, data Epdeskel,

hingga bukti fisik kegiatan dan inovasi pelayanan publik. Bagi desa yang memiliki sumber daya manusia terbatas, dokumen-dokumen ini menjadi beban kerja yang berat. Aparatur desa yang jumlahnya sedikit harus menggandakan fokus antara pelayanan masyarakat dan pemenuhan dokumen lomba, sehingga dapat mengganggu efektivitas kerja harian desa.

Kedua, tidak tersedianya informasi transparan mengenai skema kuantitatif penilaian juga menambah tingkat kesulitan desa dalam mengikuti lomba. Banyak kepala desa yang mengaku tidak mengetahui bobot setiap indikator serta skala penilaian yang digunakan dalam menentukan skor keseluruhan. Akibatnya, strategi optimalisasi nilai menjadi tidak jelas dan desa tidak mampu menilai area mana yang harus diperbaiki atau diprioritaskan agar sesuai dengan ekspektasi penilai.

Ketiga, terkait dengan peningkatan kapasitas desa, mekanisme pendampingan teknis belum diatur secara terperinci dalam petunjuk teknis lomba. Desa dengan kapasitas rendah terutama di bidang administrasi dan tata kelola sangat membutuhkan dukungan teknis dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ketiadaan panduan pendampingan yang jelas berpotensi memperlebar kesenjangan antara desa yang memiliki kapasitas tinggi dengan desa tertinggal.

Keempat, instrumen penilaian lomba masih belum mengantisipasi ketimpangan potensi wilayah, terutama bagi desa kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Belum ada mekanisme afirmasi atau pembobotan khusus yang dapat memberikan peluang yang lebih adil bagi desa-desa tersebut untuk bersaing dengan desa maju. Akibatnya, desa dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan ekonomi lokal cenderung akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan nilai yang tinggi meskipun usaha partisipasi masyarakat dan semangat pembangunan yang ditunjukkan cukup kuat.

Kelima, terdapat potensi duplikasi penilaian antar level (evaluasi diri, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional) dengan indikator yang relatif serupa. Hal ini tidak hanya menimbulkan pemborosan waktu dan sumber daya manusia desa tetapi juga meningkatkan tingkat kelelahan administratif aparatur desa yang harus berulang kali memenuhi permintaan data yang hampir sama. Selain itu, meskipun pelestarian budaya lokal telah disebut sebagai salah satu indikator dalam penilaian, pedoman teknis mengenai pengukuran keberhasilan aspek sosial budaya masih sangat terbatas. Desa yang kaya budaya seringkali hanya menampilkan kegiatan seni saat penilaian tanpa memiliki indikator capaian yang mengarah pada transformasi sosial atau keberlanjutan pelestarian nilai budaya lokal.

Terakhir, tidak adanya petunjuk teknis terkait prosedur penyelesaian sengketa penilaian atau mekanisme banding jika peserta merasa dirugikan atau tidak setuju dengan hasil penilaian. Ketiadaan regulasi ini dapat menimbulkan konflik di antara desa peserta dan pihak penyelenggara, serta berpotensi mengurangi rasa kepercayaan desa terhadap kredibilitas hasil evaluasi lomba.

3. Kebijakan Representasi Satu Desa per Kecamatan

Persoalan lain muncul dari mekanisme seleksi internal di tingkat kecamatan. Kepala Desa Simbar Haidir menjelaskan bahwa di kecamatannya, peserta lomba desa dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan pihak kecamatan. Dengan mekanisme ini, hanya satu desa yang akan ditunjuk untuk mewakili kecamatan dalam lomba. Desa lain secara otomatis tidak bisa ikut serta, tetapi tetap memberikan dukungan kepada desa yang menjadi perwakilan. Mekanisme representasi seperti ini, meskipun bisa dianggap efisien, pada akhirnya turut mempersempit ruang partisipasi karena jumlah peserta akan selalu terbatas.

Kepala Desa Sungai Simbar (Haidir) menyampaikan:

“Di kecamatan kami sudah sepakat, hanya satu desa yang ikut. Kalau semua mau ikut kan tidak bisa juga. Jadi kita dukung desa yang ditunjuk.”

(Wawancara, Kepala Desa Sungai Simbar)

Kebijakan ini memunculkan isu kompetisi internal desa dalam kecamatan dan menjadi faktor pembatas struktural. Haidir menilai kebijakan ini diambil karena bisa jadi untuk menutup biaya lomba yang lumayan tinggi, sehingga dengan kerjasama antardesa hal itu bisa dimimalisir.

4. Faktor Budaya dan Seremonial

Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Ibnu Sina menjelaskan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan sebenarnya tidak mengharuskan desa mengadakan acara besar dan mengeluarkan biaya tinggi. Ia menyampaikan:

“Sebenarnya tidak ada kewajiban desa membuat acara atau pesta rakyat. Penilaian itu ya cukup dengan dokumen, verifikasi lapangan, inovasi desa. Namun di desa sering tidak ada event besar, jadi lomba desa ini malah jadi momen bagi warga untuk membuat acara meriah.”

Ibnu Sina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi sudah berupaya melakukan sosialisasi agar desa tidak terbebani secara finansial. Ia menyatakan:

“Kami sudah bersurat ke PMD kabupaten/kota bahwa tidak ada aturan untuk harus mengadakan hiburan menyambut tim penilai. Tapi itulah fakta sosial di lapangan, masyarakat malah senang karena ini menjadi ajang kebersamaan.”

Ia kemudian mencontohkan kasus di Kabupaten Siak yang memperlihatkan antusiasme masyarakat begitu tinggi dalam menyambut lomba:

“Seperti di Siak, khususnya di Bunga Raya, itu bahkan sampai mendatangkan bupati dalam penyambutan. Ada pentas budaya, makan-minum, sampai pesta rakyat. Itu bagian dari budaya masyarakat kita dalam menyambut tamu.”

Menurutnya, kondisi ini lahir dari kearifan lokal (local wisdom) yang menempatkan penyambutan tamu sebagai simbol kehormatan. Budaya itu kemudian dilekatkan pada momentum lomba desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa penyelenggaraan acara besar adalah suatu kewajiban.

Namun di balik antusiasme tersebut, ia juga mengakui adanya dampak terhadap kemampuan ekonomi desa. Biaya pelaksanaan seringkali membebani desa sehingga beberapa desa memilih tidak mengikuti lomba karena khawatir pengeluaran menjadi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

“Memang ada desa yang merasa keberatan ikut lomba karena takut biaya yang keluar terlalu banyak, padahal tujuannya bukan itu. Nah, ini yang terus kita luruskan persepsinya ke depan.”

Ibnu Sina berharap ke depan perlu ada komunikasi lebih intensif antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa dalam pemahaman regulasi teknis lomba, sehingga esensi pembinaan dan evaluasi pembangunan desa tidak berubah menjadi perlombaan seremonial yang menambah beban desa.

Selain faktor-faktor di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa pola komunikasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah desa belum berjalan efektif. Selama ini, pemerintah provinsi lebih banyak menggunakan pola komunikasi top-down, di mana informasi lomba disampaikan terlebih dahulu ke pemerintah kabupaten/kota melalui surat edaran. Dari kabupaten/kota, barulah informasi diteruskan ke tingkat kecamatan dan desa. Namun, mekanisme komunikasi berjenjang ini sering kali tidak berjalan mulus. Tidak semua kabupaten/kota menindaklanjuti surat edaran dengan cepat, sehingga ada desa yang terlambat atau bahkan tidak menerima informasi sama sekali. Desa yang memiliki jaringan

komunikasi lebih baik dengan pemerintah kabupaten biasanya lebih beruntung karena memperoleh informasi lebih awal, sementara desa lain kerap tertinggal.

Keterbatasan akses teknologi juga memperburuk situasi. Sebagian desa di wilayah pesisir dan pedalaman masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet, sementara sebagian besar informasi lomba kini disebarluaskan melalui kanal digital seperti WhatsApp, situs web DPMD, atau media sosial resmi pemerintah. Kondisi ini membuat desa yang memiliki keterbatasan infrastruktur komunikasi tidak dapat memperoleh informasi secara utuh. Akibatnya, desa-desa tersebut tidak punya cukup waktu untuk melakukan persiapan apabila ingin ikut lomba.

Lebih jauh lagi, terdapat faktor kultural yang memengaruhi partisipasi. Bagi sebagian desa, lomba desa dianggap sekadar kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pandangan ini muncul karena desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Keterlibatan dalam lomba dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan nyata warga desa, sehingga menurunkan motivasi untuk ikut serta.

Namun, berbeda halnya dengan desa-desa yang berhasil ikut serta dalam lomba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desa/kelurahan yang berpartisipasi umumnya memiliki beberapa faktor pendukung. Pertama, dukungan kuat dari pemerintah kabupaten/kota, baik berupa pendampingan teknis maupun alokasi sumber daya, membuat desa lebih siap menghadapi lomba. Kedua, kepemimpinan kepala desa atau lurah juga memainkan peran penting. Kepala desa/lurah yang visioner dan bersemangat mampu memobilisasi perangkat desa dan masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ketiga, akses informasi yang lebih cepat dan luas membuat desa mampu merespons undangan lomba dengan segera. Keempat, kapasitas administrasi desa yang lebih baik memungkinkan perangkat desa menyusun laporan dan memenuhi berbagai persyaratan lomba dengan lebih mudah.

Bila dicermati lebih dalam, temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antar desa dalam hal kemampuan berpartisipasi. Desa dengan dukungan struktural dan kapasitas administratif yang baik memiliki peluang lebih besar untuk ikut serta, sementara desa dengan keterbatasan sumber daya hampir pasti absen. Dengan demikian, rendahnya tingkat partisipasi desa dalam lomba desa dan kelurahan bukan hanya masalah kurangnya informasi, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan peluang antar desa di Provinsi Riau.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong partisipasi desa pada lomba desa dan kelurahan bersifat multidimensional. Tidak hanya menyangkut bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga terkait dengan biaya, kompleksitas teknis, mekanisme representasi, serta persepsi desa terhadap manfaat lomba. Rendahnya jumlah peserta tahun 2025 menjadi cermin bahwa strategi komunikasi yang digunakan selama ini belum cukup efektif dan belum mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi desa.

Ibnu menilai untuk menambah antusiasme peserta di samping insentif yang banyak, seperti di Jawa Timur ada yang dapat hadiah Rp1 miliar. Di samping itu sebaiknya juga ada insentif lain misalnya desa yang juara ini butuh jalan, Dinas PU harus bantu, butuh pengembangan guru maka Dinas Pendidikan ikut membantu. Kalau dilakukan oleh semua sektor pemerintah dia yakin peminat lomba akan lebih meningkat.

Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tantangan komunikasi yang mendasar ketika kebijakan lomba desa dan kelurahan harus diterjemahkan ke tingkat desa. Salah satu hambatan utama adalah beban biaya yang dirasakan oleh desa sebagai bagian dari persiapan lomba. Ketika desa memaknai bahwa mengikuti lomba berarti mengadakan acara besar, menyediakan penerimaan tamu, serta memobilisasi masyarakat—hal ini menambah beban anggaran lokal dan menggeser prioritas dari pelayanan dasar ke aspek kompetisi. Studi menunjukkan bahwa kapasitas lokal yang terbatas membuat desa memilih untuk tidak berpartisipasi karena pertimbangan ekonomi yang rasional (Setiawan, 2023). Dengan demikian, strategi komunikasi pemerintah provinsi harus memperjelas bahwa lomba bukanlah beban ekonomi tambahan bagi desa, melainkan sarana evaluasi dan pembinaan.

Selanjutnya, beban administrasi yang kompleks muncul sebagai tantangan signifikan dalam pelaksanaan lomba. Desa-kelurahan harus memenuhi berbagai persyaratan dokumen: RPJMDes, RKPDDes, APBDes, data epdeskel, dan sebagainya—yang memerlukan sumber daya manusia dan waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi tentang “administrative burden”, yaitu beban belajar dan kepatuhan dalam interaksi aparat desa dengan kebijakan pemerintah (Moynihan dkk., 2015). Ketika instrumen penilaian tidak disampaikan secara jelas atau terlalu rumit, maka efektivitas komunikasi kebijakan menjadi rendah dan desa merasa teralienasi dalam prosedur yang seolah “lebih berat dari manfaatnya”.

Kemudian, mekanisme utusan per kecamatan (hanya satu desa perwakilan kecamatan) di beberapa daerah misalnya memperkenalkan tantangan komunikasi struktural

dan distribusi informasi. Kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidakmerataan partisipasi karena desa-desa lain dianggap “tidak mendapatkan kesempatan”. Dari sudut literatur governance, ketimpangan kapasitas tata kelola antar wilayah sering menjadi penghambat implementasi kebijakan desa (Asif dkk., 2021; Zaitul dkk., 2023). Pemerintah Provinsi Riau harus memastikan bahwa mekanisme seleksi ini dikomunikasikan dengan transparan, sehingga desa-desa memahami prosesnya dan tidak melihatnya sebagai penghalang partisipasi.

Aspek budaya seremonial seperti tradisi menyambut tamu—pentas budaya, makan-minum bersama, kehadiran bupati—menjadi bagian dari dinamika lokal yang dapat mengaburkan maksud komunikasi kebijakan lomba desa. Penelitian tentang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa ketika kegiatan pembangunan atau program pemerintah terbentuk sebagai upacara atau formalitas saja, maka partisipasi menjadi simbolis dan bukan substantif (“tokenism”) (Putra, 2023; Sopanah, 2021)

Budaya ini harus dipahami oleh pemerintah provinsi sebagai elemen kontekstual yang memerlukan strategi komunikasi sensitif budaya: bukan menghapus budaya tersebut, tetapi mengarahkan agar kegiatan tetap produktif dan relevan dengan tujuan kebijakan. Akhirnya, dari perspektif komunikasi pemerintah, semua tantangan tersebut menuntut strategi yang lebih difokuskan pada kejelasan pesan, konteks lokal, dan akses dua arah. Pemerintah provinsi perlu menyederhanakan instrumen penilaian, menurunkan beban biaya dan administrasi, menjelaskan mekanisme utusan kecamatan secara terbuka, serta menjembatani aspek budaya dengan orientasi pembangunan yang nyata. Dengan demikian, komunikasi kebijakan lomba desa dan kelurahan tidak sekadar disampaikan secara top-down, tetapi membangun pemahaman yang mendalam di tingkat desa sehingga partisipasi menjadi bukan hanya simbol, melainkan kontribusi nyata terhadap tata kelola dan kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan positif sebagai instrumen evaluasi dan motivasi percepatan pembangunan desa–kelurahan. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih muncul, terutama terkait kompleksitas instrumen penilaian, beban administrasi yang tinggi, serta minimnya dukungan pendampingan teknis bagi desa yang memiliki kapasitas rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan kesiapan sumber

daya antara desa maju dan desa tertinggal yang memengaruhi partisipasi dalam lomba. Hal ini tampak dari alasan beberapa desa yang enggan ikut lomba karena tingginya biaya persiapan dibanding potensi hadiah yang diterima.

Di sisi lain, aspek seremonial dalam menyambut tim penilai masih menjadi fokus di tingkat daerah, sehingga sering menimbulkan duplikasi beban pembiayaan dan mengaburkan orientasi utama lomba sebagai evaluasi pembangunan substantif. Belum tersedianya mekanisme keberatan atas hasil penilaian serta kurang terakomodasinya indikator sosial budaya secara mendalam juga menjadi catatan penting dalam upaya perbaikan kebijakan. Karena itu, ke depan diperlukan penyederhanaan instrumen penilaian, penguatan pendampingan, transparansi skoring, serta afirmasi bagi desa 3T agar pelaksanaan lomba berlangsung lebih adil, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat desa.

Referensi

- Al-Aslam, D. F. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN (Studi pada Kantor Kelurahan Eka Jaya [Other, Universitas Jambi]*. https://repository.unja.ac.id/41377/?utm_source=chatgpt.com
- Alfarizhi, S., & Nuryanto, Y. (2024). EVALUASI SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNGMANIK, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(2), 427–441. <https://doi.org/10.24198/janitra.v4i2.60335>
- Asif, N., Utaberta, N., Ismail, S., & Shaharil, M. I. (2021). THE STUDY ON THE FUNCTIONAL ASPECTS OF MOSQUE INSTITUTION. *Journal of Islamic Architecture*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.18860/jia.v6i4.11749>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>
- Bolombo, P. A. L. O. (2025). *Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025*. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Canel, M. J., & Luoma-aho, V. (2019). *Public sector communication: Closing the gaps between public citizens and organizations* (1st edition). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119135630>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

- Denzin, N. K. (2012). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Haryanto, A. T. (2024). *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Hong, H. (2013). Government websites and social media's influence on government-public relationships. *Public Relations Review*, 39(4), 346–356. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.07.007>
- Haris, M., Adilah, A. R., & Laksana, B. I. (2023). TIGA STRATEGI KOMUNITAS GENKOMPAK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING GENERASI MUDA. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 123–133.
- Haris, M., Laksana, B. I., Yefni, Y., & Hendrayani, M. (2024). Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 6(2), 351–370.
- Mas'od, M. M., Anshori, A. M., Ansori, T., Haris, M., & Ibrahim, M. (2023). EFEKTIFITAS KOMUNIKASI PNPM MANDIRI DENGAN PEMANFATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG. *Nusantara Hasana Journal*, 3(8), 262–282.
- Kemendagri Gelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional 2024* | tempo.co. (2024, September 20). Tempo. <https://www.tempo.co/info-tempo/kemendagri-gelar-pemaparan-calon-juara-lomba-desa-tingkat-regional-2024-7578>
- Kumpulainen, K. (2016). The Village of the Year Competition Constructing an Ideal Model of a Rural Community in Finland. *Sociální Studia / Social Studies*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.5817/SOC2016-2-55>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE.
- Liu, B. F., & Horsley, J. S. (2007). The Government Communication Decision Wheel: Toward a Public Relations Model for the Public Sector. *Journal of Public Relations Research*, 19(4), 377–393. <https://doi.org/10.1080/10627260701402473>
- Maros, A. M. A. (2021). FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PANJANG. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2(0). <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3234>
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43–69.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

- Pavel, P., Daniela, S., & Adam, S. (2015). Images Of A Good Village: A Visual Analysis Of The Rural Idyll In The “Village Of The Year” Competition In The Czech Republic. *European Countryside*, 7(2), 68–86.
- Putra, F. (2023). Village governance and public participation in Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2). <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN DI DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN. *Publika*, 8(5). <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%p>
- Rahmawati, D. E., & Rasyid, H. A. N. (2022). Pendampingan Penyusunan Buku Profil Desa. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3, 1–11.
- Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 39(3), Article 3. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>
- Sopannah, A. (2021). Beyond ceremony: The impact of local wisdom on public participation in local government budgeting. *Journal of Asian and African Studies*, 10(2).
- Surat Mendagri Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2025 / PDF. (t.t.). Scribd. Diambil 11 Oktober 2025, dari <https://id.scribd.com/document/863777865/Surat-Mendagri-Petunjuk-Pelaksanaan-Lomba-Desa-dan-Kelurahan-Tahun-2025>
- Winther, M. B., & Svendsen, G. L. H. (2012). ‘The Rotten Banana’ fires back: The story of a Danish discourse of inclusive rurality in the making. *Journal of Rural Studies*, 28(4), 466–477. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.05.003>
- Yova, Y. M. S., & Mashur, D. (2025). Strategi Pengembangan Kelurahan Berbasis Epdeskel Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 109–121. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8222>
- Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *SELAMI IPS*, 16(1), 62–67. <https://doi.org/10.36709/selami.v16i1.53>
- Yusuf, A. M. (2013). DAMPAK PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT (STUDI DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA). *JPMIS*, 0, Article 0. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/1147>
- Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 13, 19. <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>
- Zulkarnain, R. (2024, September 20). Kemendagri Gelar Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2024. *Aktual.com*. <https://aktual.com/kemendagri-gelar-lomba-des-dan-kelurahan-berprestasi-tingkat-nasional-2024/>